



RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dalam penyusunan KUA/PPAS dan menjadi pedoman kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Semoga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan,

2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**



ACHMAD FADLY, S.SOS, M.SP

PEMBINA TK. I

NIP. 19740319 199402 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen lain	2
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.	29
2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi	30
2.3.2. Formulasi isu-isu penting	30
2.4. Review Terhadap RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	43
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	48
3.3 Program dan Kegiatan	52
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
BAB V PENUTUP.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Program Tahun 2025.....	10
Tabel 2.2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis BAPENDA Provinsi Sumatera Utara.....	14
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPENDA Provinsi Sumatera Utara	32
Tabel 2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Provsu	38
Tabel 2.5. Usulan Program dan kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara.....	47
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara	50
Tabel 3.2. Rencana Target Pendapatan Dearah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.....	52
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 BAPENDA Provinsi Sumatera Utara	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	1
Gambar 1.2.	Proses penyusunan dan keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan lainnya	2
Gambar 3.1.	Cascading Keterkaitan Dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

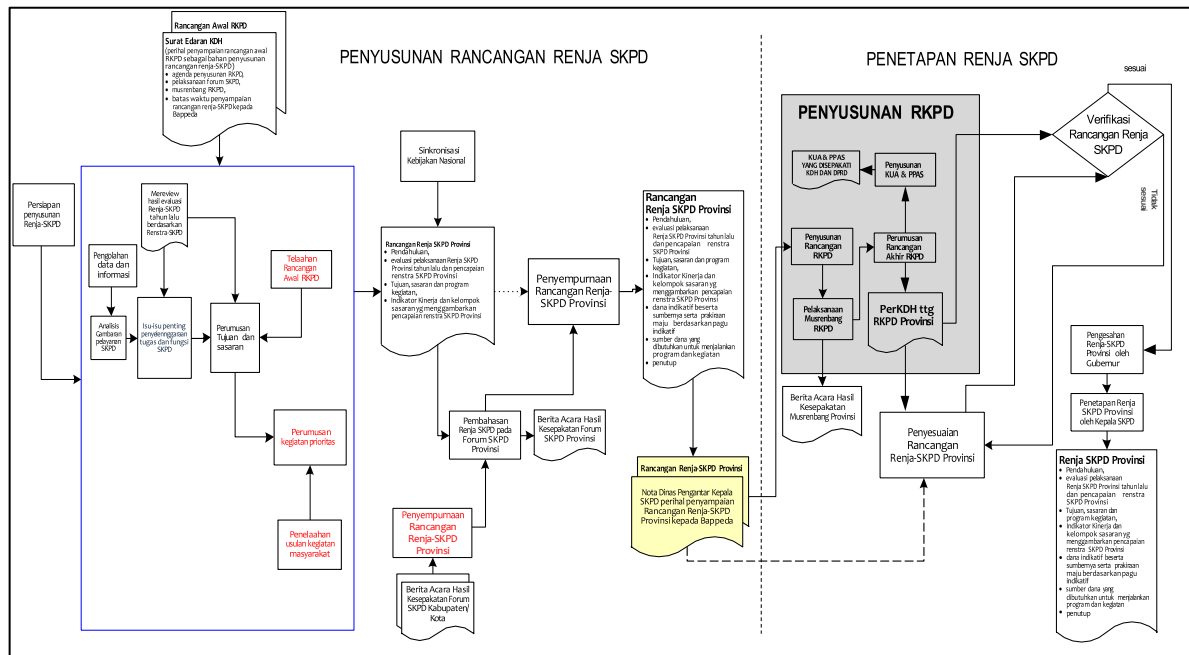
Melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Bapenda Sumut merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan, yaitu pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Renja Bapenda Sumut Tahun 2025 disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.

Dokumen ini memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dokumen Rencana Kerja juga mengatur tentang dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Program yang dimaksud dijabarkan sesuai dengan kebijakan perangkat daerah yang berisi kegiatan-kegiatan pendukung guna menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome).

1.1.1. Proses Penyusunan Renja PD

Penyusunan Renja PD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada bagian ketujuh tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pasal 125 s.d 135. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terlihat pada gambar di bawah ini.



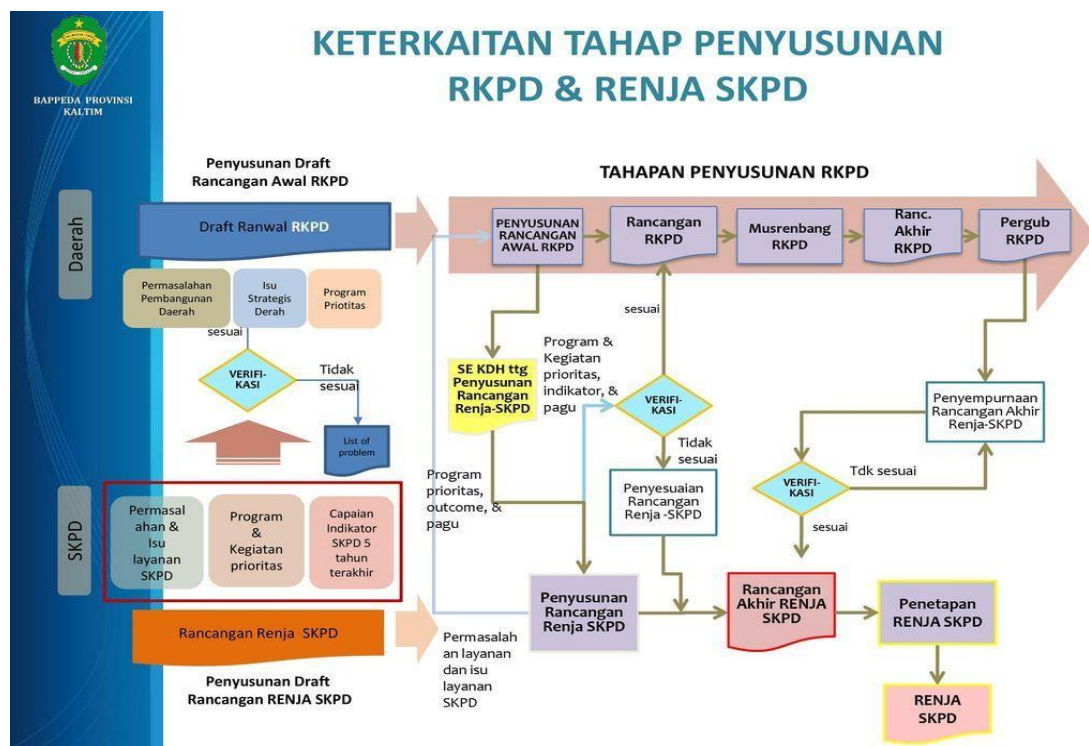
Gambar 1.1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1.2. Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Lain

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Oleh karenanya Renja Tahun 2025 ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara guna memenuhi kebutuhan belanja Pembangunan daerah.

Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 3 Tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dijabarkan berdasarkan Renstra OPD dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RPKD tahun 2025. Secara diagramatis keterkaitan hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2.

Proses penyusunan dan keterkaitan renja dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengacu pada gambar di atas diketahui bahwa secara rinci hubungan Renja dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut: Renja PD disusun dengan mempedomani Renstra PD dan mengacu pada RKPD. RKPD yang telah disahkan kemudian dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini harus mensinkronkan kepada dokumen RKP dan Renja K/L.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, perlu disusun untuk menjabarkan prioritas dan target kinerja serta menjadi pedoman pelaksanaan dari setiap Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 disusun merupakan tahun ke 2 (empat) Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026, sehingga dasar penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini menjadi sangat penting karena merupakan penjabaran dari arah kebijakan Pembangunan daerah yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1956 tambahan Lembaran Negara nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 12);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2025.
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu untuk memenuhi amanat Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, yaitu:

1. Menjadi landasan operasional bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025;
2. Menjadi bahan pendukung penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Renja BAPENDA Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi
 - 2.3.2. Formulasi isu – isu penting
- 2.4. Review terhadap RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Inovasi Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Utara difokuskan terhadap capaian masing-masing program Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dan satuan pengukurannya yakni sebagai berikut :

❖ *Capaian Kinerja Indikator Program (Outcome)*

Adapun capaian kinerja program dan realisasi keuangan dari masing-masing program dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 2.1. Capaian Kinerja Program dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

No.	Program	Kinerja Program				Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	512.451.980.768	495.451.590.768	96,67	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	108.498.00	90.576.000	83,48	Tinggi
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100	Sangat Tinggi	15.749.417.749	14.328.717.749	90,98	Sangat Tinggi
Jumlah Rata-rata				100	Sangat Tinggi	528.350.896.118	509.870.884.517	96,50	Sangat Tinggi

Dari Tabel Capaian Kinerja Program dan Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan TW IV Tahun Anggaran 2023 di atas, diketahui bahwa terdapat 3 program yang dilaksanakan dengan rata-rata capaian Kinerja Program sebesar 100

persen dengan predikat Sangat Tinggi dan rata-rata Realisasi Keuangan sebesar 96,50 persen dengan predikat Sangat Tinggi.

❖ *Capaian Kinerja Indikator Kegiatan (Output)*

Kegiatan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, dimana terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Table 2.2. Capaian Kinerja Kegiatan dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

No.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Kinerja			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	$5 = (4/3) * 100$	6
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	Sangat Tinggi
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.396 Orang/Lap	3.396 Orang/Lap	100%	Sangat Tinggi
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32 Orang	32 Orang	100%	Sangat Tinggi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	100%	Sangat Tinggi
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 Unit	13 Unit	100%	Sangat Tinggi
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%	Sangat Tinggi
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91 Unit	91 Unit	100%	Sangat Tinggi
8	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100%	Sangat Tinggi
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	24 Laporan	24 Laporan	100%	Sangat Tinggi
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>				100%	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan rata-rata capaian sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

Adapun penjelasan target, capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.096.016.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.079.790.143,- (98,52 %).
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 160.900.000 terealisasi sebesar Rp. 160.053.000,- (99,47 %)
- Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.909.599.000,- terealisasi sebesar Rp 1.594.287.130,- (83,49 %)

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara dengan anggaran sebesar Rp 215.216.254.558,- terealisasi sebesar Rp 202.787.230.673,- (94,22%)
- Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 34.877.569.500,- terealisasi sebesar Rp 31.225.928.073,- (89,53%)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 343.640.000,- s terealisasi sebesar Rp. 341. 480.850,- (99,37%)
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp 373.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 307.995.500,- (82,40%)

c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.243.731.420.696,- terealisasi sebesar Rp 235.030.216.815,- (96,43 %)
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 1.624.217.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.500.875.108,- (92,41 %)

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.952.820.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.155.487.000,- (73,00 %)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 389.875.000,- terealisasi sebesar Rp. 386.937.700,- (99,25 %)
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp. 280.380.000,- terealisasi sebesar Rp. 254.894.250,- (90,91 %)

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pemindahan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 179.300.000,- terealisasi sebesar Rp 176.321.662,- (98,34 %)
- Meningkatnya Kualitas Sumber Daya ASN dengan anggaran Rp. 1.621.983.100,- terealisasi sebesar Rp. 918.638.780,- (56,64 %)

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 8.424.055.400,- terealisasi sebesar Rp 8.327.128.800,- (98,85 %)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 22.950.363.744,- terealisasi sebesar Rp. 21.602.899.285,- (94,13%)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 492.000.000,- terealisasi sebesar Rp 454.269.675,- (92,33 %)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 6.096.010.000,- terealisasi sebesar Rp 5.203.999.482,- (85,37 %)
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp 41.643.694.318,- terealisasi sebesar Rp 38.622.891.192,- (92,75%)

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 9.144.006.600 terealisasi sebesar Rp 6.352.064.427,- (69,47 %)

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 47.954.686.595,- terealisasi Rp. 46.902.759.883,- (97,81 %)

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 9.812.466.221,- terealisasi sebesar Rp. 8.736.048.476,- (89,03 %).
- Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 12.332.227.000 sebesar Rp. 11.911.816.963,- (96,59 %)
- Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 8.271.352.400,- terealisasi sebesar Rp 7.680.932.594,- (92,86 %)

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / kota dengan anggaran sebesar Rp. 108.498.000,- sampai dengan tidak terealisasi (0%) terealisasi sebesar Rp. 90.576.000 (83,48 %).

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan pengelolaan pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp. 788.675.000,- terealisasi sebesar Rp 580.136.300,- (73,56 %)
- Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.507.801.900,- terealisasi sebesar Rp. 2.057.418.428,- (82,04 %).
- Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp 7.437.054.180,- terealisasi sebesar Rp 7.058.668.960,- (94,91%)

- Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.270.426.000,- terealisasi sebesar Rp. 886.513.900,- (69,78%).
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp 816.170.000,- sebesar Rp 655.571.100,- (80,32 %).
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.929.290.250,- terealisasi sebesar Rp. 2.458.528.171,- (83,93 %).

❖ *Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Provsui*

Hasil kinerja IKU dan IKK Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

Table 2.3. Capaian Kinerja IKU BAPENDA Provsu Tahun 2023

NO.	IKU/IKK PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI TAHUN 2023 S.D TW IV	CAPAAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	57,00	56,82	99,68	Sangat Tinggi
2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya	Persen	11,66	-1,47	-12,61	Sangat Rendah
3	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya	Persen	1,20	12,64	1.053,33	Sangat Tinggi
4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari Tahun Sebelumnya	Persen	2,00	-27,80	-1.390,00	Sangat Rendah
5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari Tahun Sebelumnya	Persen	10,80	-2,14	-19,81	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja					-53,88	Sangat Rendah

Dari 5 indikator pada tabel di atas yang menjadi IKU dan IKK Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, rata-rata capaian kinerja sebesar - 53,88 persen dengan predikat Sangat Rendah. Target indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan tahun 2023 sebesar 57,00 persen, realisasi sebesar 56,82 persen dengan capaian sebesar 99,68 persen yang telah ditetapkan pada RKPD Perubahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Kenaikan persentase PAD Terhadap Pendapatan didukung dari penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya tahun 2023 sebesar 11,66 persen dengan realisasi sebesar -1,47 persen dengan capaian -12,61 Persen. Tidak tercapainya target ini dikarenakan belum optimalnya sosialisasi layanan kemudahan e-Samsat Sumut Bermartabat.

Target indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari Tahun Sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 1,20 persen dengan realisasi 12,64 persen dengan capaian sebesar 1.053,33 persen. Hal ini disebabkan karena faktor kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2022. Target indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan tahun 2023 sebesar 2,00 persen dengan realisasi sebesar -27,80 persen dengan capaian -1,390,00 persen. Hal ini menunjukkan program/kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilakukan tidak berdampak terhadap indikator kinerja. Target indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari Tahun Sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 10,80 persen dengan realisasi sebesar - 2,14 persen dengan capaian sebesar -19,81 persen. Hal ini menunjukkan program/kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilakukan tidak berdampak terhadap indikator kinerja.

Adapun faktor – faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2023 antara lain:

1. Kesadaran wajib pajak akan tertib administrasi terhadap kepemilikan kendaraan masih kurang untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sementara beberapa kegiatan-kegiatan;
2. Pemanfaatan layanan kemudahan seperti e-Samsat Sumut Bermartabat dalam membayar pajak belum merata di setiap daerah;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan di Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan;
4. Dalam proses intensifikasi pajak banyak ditemukan data kepemilikan kendaraan bermotor tidak valid.

Sedangkan yang menjadi faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi, sinergitas dan kerjasama Pemprov Sumut dengan APH serta stakeholder terkait dalam optimalisasi pendapatan daerah sudah terbangun dengan baik;
2. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam rangka akselerasi optimalisasi pendapatan daerah;
3. Kerja keras seluruh jajaran ASN Bapenda Provsu dan dalam rangka memberhasilkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
4. Adanya sistem aplikasi berbasis IT dalam rangka memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

**Tabel 2.4. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara**

FORMULIR EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PRIODE PELAKSANAAN AGUSTUS SD OKTOBER (TRIWULAN III) TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Ranja Perangkat Daerah Tahun 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2023 (%)	OPD Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi	9.474 lap	415.228.812.542,00	9474 lap	735.607.627.581,00	3.576 Orang/ Lap	512.492.980.788	1082 lap	70.723.958.242	58 lap		1248 Lap	288.723.167.153	1248 Lap	129.405.846.098	3.576 Orang/ Lap	495.451.590.768	2.687 orang/ Lap	1.231.059.218.349	96,67%	2,96	BAPENDASU
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60 laporan	3.166.350.000	48 laporan	6.189.138.588	12 laporan	3.166.515.000	1 Lap	89.288.500	-	-	8 Lap	1.395.406.001	5 Lap	1.349.435.772	12 Lap	2.834.130.273	57 Lap	9.023.268.861	89,50%	2,850	BAPENDASU
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dok	686.713.140	16 Dok	1.909.778.691	4 Dok	1.096.016.000	0	-	0	-	3 Dok	391.067.101	1 Dok	688.723.042	4 Dok	1.079.750.143	19 Dok	2.989.568.834	98,52%	4,353	BAPENDASU
		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Laporan	254.631.100	16 Laporan	166.610.700	4 Lap	160.900.000	0	-	0	-	3 Lap	-	1 Lap	160.053.000	4 Lap	160.053.000	19 Lapora n	326.663.700	99,47%	1,283	BAPENDASU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	2.225.005.760	16 laporan	4.112.749.197	4 Lap	1.909.599.000	1 lap	89.288.500	-	-	2 Lap	1.004.338.900	2 Lap	500.659.730	4 Lap	1.594.287.130	19 Lap	5.707.036.327	83,49%	2,565	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		91,66%	145,79	93,83%				
Predikat Kinerja																								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	16.900 Oran/Lap	250.617.066.253	13.584 Orang/ Lap	471.172.438.694	3.396 Orang/ Lap	243.731.420.696	845 Orang/ Lap	61.831.663.641	847 Orang/ Lap	553.380.000	851 Orang/ Lap	119.427.049.353	3.396 Orang/ Lap	57.516.317.879	3.396 Orang/ Lap	239.328.410.873	16.127 Orang/ Lap	710.500.849.567	98,19%	2,835	BAPENDASU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.900 Orang	244.278.757.723	13.520 Orang	433.094.740.260	3.380 Orang	243.731.420.696	845 Org	61.831.663.641	845 Org	-	845 Orang	118.015.890.114	845 Orang	55.182.663.060	3.380 Orang	235.030.216.815	16.055 Org	668.124.957.075	96,43%	2,735	BAPENDASU
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dok	1.155.189.520	16 Dok	32.668.616.084	4 Dok	1.624.217.000	0		1 Dok	149.030.000	1 Dok	367.523.739	2 Dok	984.321.369	4 Dok	1.500.875.108	18 Dok	34.169.491.192	92,41%	29,579	BAPENDASU
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dok	4.113.343.170	16 Dok	3.828.267.000	4 Dok	2.952.820.000	0		1 Dok	404.350.000	1 Dok	722.892.000	2 Dok	1.028.245.000	4 Dok	2.155.487.000	18 Dok	5.983.754.000	73,00%	1,455	BAPENDASU

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Terget Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Rangka Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2023 (%)		UPTD Penanggung Jawab			
										I		II		III		IV											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Laporan	497.142.200	16 laporan	951.573.850	4 Laporan	389.875.000	0			-	-	2 Lap	187.415.000	2 Lap	199.522.700	4 Laporan	386.937.700	18 Lap	1.338.511.550	99,25%	2,692	BAPENDASU		
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dok	572.633.640	16 Dok	629.241.500	4 Dok	280.380.000	0				-	2 Dok	133.328.500	2 Dok	121.565.750	4 Dok	254.894.250	18 Dok	884.135.750	90,91%	1,544	BAPENDASU		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																							73,00%	283,50	75,80%		
Predikat Kinerja																											
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawain	160 orang	1.044.228.900	128 orang	1.520.757.300	32 orang	1.801.283.100	0		-	-	-	25 Orang	542.292.880	7 Orang	552.667.562	32 orang	1.094.960.442	153 Orang	2.615.717.742	60,79%	2,505	BAPENDASU		
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahhugaskan	100 Orang	198.687.200	80 Orang	776.189.000	20 Orang	179.300.000	0				-	15 Orang	44.053.000	5 Orang	132.268.662	20 Orang	176.321.662	95 Orang	952.510.662	98,34%	4,794	BAPENDASU		
		Pendidkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya ASN	60 orang	845.541.700	48 orang	744.568.300	12 orang	1.621.983.100	0			-	-	10 Orang	498.239.880	2 Orang	420.398.900	12 orang	918.638.780	58 Orang	1.663.207.080	56,64%	1,967	BAPENDASU		
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																							88,12%	250,49	77,49%		
Predikat Kinerja																											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	120 Lap	44.108.497.817	96 Lap	110.944.430.795	24 Lap	80.486.728.176	3 Lap	2.919.248.280	6 Lap	9.186.073.314	6 Lap	27.855.086.368	9 Lap	35.921.405.867	24 Lap	75.081.813.829	111 Lap	186.026.244.624	93,28%	4,217	BAPENDASU			
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	458.951.710	16 Laporan	908.545.472	4 Laporan	880.604.714	0		1 Lap	173.245.637	1 Lap	206.117.026	2 Lap	491.262.732	4 Laporan	870.625.395	18 Lap	1.779.170.867	98,87%	3,877	BAPENDASU			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	25.861.609.929	16 Laporan	71.312.972.293	4 Laporan	41.643.694.318	1 Lap	2.849.800.000	1 Lap	7.315.136.814	1 Lap	10.699.885.619	1 Lap	17.758.068.759	4 Laporan	38.622.891.192	19 Lap	109.935.863.485	92,75%	4,251	BAPENDASU			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/eralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Paket	8.286.323.305	16 Paket	13.152.650.229	4 Paket	8.424.055.400			1 Paket	191.612.000	1 Paket	3.433.983.800	2 Paket	4.701.533.000	4 Paket	8.327.128.800	18 Paket	21.479.779.029	98,85%	2,592	BAPENDASU			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen Bjumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan/ahan Bacaan	20 Dok	4.895.520.803	16 Dok	17.306.839.173	4 Dok	22.950.363.744			1 Dok	181.179.559	1 Dok	11.027.533.350	2 Dok	10.394.186.376	4 Dok	21.602.899.285	18 Dok	38.909.738.458	94,13%	7,948	BAPENDASU			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dok	732.805.500	16 Dok	1.131.361.500	4 Dok	492.000.000	1 Dok	6.510.000	1 Dok	113.963.500	1 Dok	104.679.500	1 Dok	229.116.675	4 Dok	454.269.675	19 Dok	1.585.631.175	92,33%	2,164	BAPENDASU			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDan	20 Laporan	3.873.286.370	16 Laporan	7.132.062.128	4 Laporan	6.096.010.000	1 Lap	82.938.280	1 Lap	1.210.935.804	1 Lap	1.582.887.073	1 Lap	2.347.238.325	4 Laporan	5.203.999.482	19 Lap	12.336.061.610	85,37%	3,185	BAPENDASU			
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																							92,5%		93,71%		
Predikat Kinerja																											

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Ranja Perangkat Daerah Tahun 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DI REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	65 unit	36.244.405.500	52 unit	27.864.730.501	13 unit	95.369.395.000	6 unit	9.739.878.465	-	-	6 Unit		1 Unit	46.611.778.657	13 unit	95.115.230.178	62 unit	122.979.960.679	99,73%	3,393	BAPENDASU
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	35 Unit	36.244.405.500	28 Unit	1.578.040.602	7 Unit	5.600.000.000	5 Unit	1.670.863.830	-	-	2 Unit		-	3.898.682.271	7 Unit	5.569.546.101	33 Unit	7.147.586.703	99,46%	0,197	BAPENDASU
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	-	24 Unit	26.286.689.899	6 Unit	89.769.395.000	1 Unit	8.069.014.635		-	4 Unit	38.763.573.056	1 Unit	42.713.096.386	6 Unit	89.545.684.077	29 Unit	115.832.373.976	99,75%	0	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																			90,76%			99,60%		
Predikat Kinerja																								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	40 laporan	52.094.827.875	32 laporan	59.478.866.700	8 laporan	57.098.693.195	2 Lap	5.883.757.821	2 Lap	11.888.782.272	2 Lap	133.924.298.868	2 Lap	21.557.985.349	8 laporan	53.254.824.310	38 Lap	112.733.691.010	93,27%	2,164	BAPENDASU
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	7.779.828.000	16 Laporan	9.018.780.974	4 Laporan	9.144.006.600	1 Lap	761.712.568	1 Lap	933.997.008	1 Lap	1.128.096.600	1 Lap	3.528.258.251	4 Laporan	6.352.064.427	19 Lap	15.370.845.401	69,47%	1,976	BAPENDASU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	44.314.999.875	16 Laporan	50.460.085.726	4 Laporan	47.954.686.595	1 Lap	5.122.045.253	1 Lap	10.954.785.264	1 Lap	12.796.202.268	1 Lap	18.029.727.096	4 Laporan	46.902.759.883	19 Lap	97.362.845.609	97,81%	2,197	BAPENDASU
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																			95,00%			83,64%		
Predikat Kinerja																								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah	300 unit	27.953.436.397	240 unit	58.437.265.003	91 unit	30.838.945.621		- 12 Unit	2.174.229.917	50 Unit	6.379.033.683	89 Unit	12.508.033.669	91 unit	28.742.228.863	319 Unit	87.179.485.866	93,20%	3,119	BAPENDASU	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 Unit	7.721.702.702	80 Unit	11.493.250.367	35 Unit	9.812.466.221		5 Unit	2.124.270.917	30 Unit	1.594.349.341	30 Unit	5.017.428.218	35 Unit	8.736.048.476	114 Unit	20.229.298.843	89,03%	2,620	BAPENDASU	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	8.579.674.775	80 Unit	27.488.637.908	22 Unit	12.332.227.000		5 Unit	49.950.000	8 Unit	4.784.684.342	9 Unit	7.077.182.621	22 Unit	11.911.816.963	97 Unit	39.400.454.871	96,59%	4,592	BAPENDASU	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	5.826.029.460	80 Unit	9.727.688.364	34 Unit	8.271.352.400		3 Unit		6 Unit		25 Unit	7.680.932.594	34 Unit	7.680.932.594	108 Unit	17.408.620.958	92,86%	2,988	BAPENDASU	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	5.826.029.460	80 Unit	9.727.688.364	34 Unit	422.900.000		3 Unit		6 Unit		25 Unit	413.422.830	34 Unit	413.422.830	108 Unit	10.141.111.194	97,76%	1,741	BAPENDASU	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																			100%			94,46%		

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Ranja Perangkat Daerah Tahun 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN										REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2023 (%)	OPD Penanggung Jawab						
							I	II	III	IV																
Predikat Kinerja																										
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah	40 laporan	208.863.960	16 Laporan	214.475.252	4 Laporan	108.498.000				-	-	1 Lap	22.300.000	3 Lap	4 Laporan	90.576.000	34 Laporan	305.051.252	0,00%	1,461			
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	20 Laporan	208.863.960	16 Laporan	214.475.252	4 Laporan	108.498.000					-	1 Lap	22.300.000	3 Lap	68.276.000	4 Laporan	90.576.000	17 Laporan	305.051.252	83,48%	1,461	BAPENDASU	
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	208.863.960	16 Laporan	214.475.252	4 Laporan	108.498.000					-	1 Lap	22.300.000	3 Lap	68.276.000	4 Laporan	90.576.000	17 Laporan	305.051.252	83,48%	1,461	BAPENDASU	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		85%		83,48%						
Predikat Kinerja																										
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	120 laporan	13.322.210.676	96 laporan	23.631.691.561	24 laporan	15.749.417.330				-	5 Lap	452.060.390	7 Lap	1.725.416.129	7 Lap	12.513.126.580	24 laporan	14.328.717.749	108 Lap	37.960.409.310	90,98%	2,849	
		Kegiatan pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah	120 laporan	13.322.210.676	96 laporan	23.631.691.561	24 laporan	15.749.417.330				10 Lap	452.060.390	7 Lap	1.665.416.129	7 Lap	12.513.126.580	24 laporan	14.328.717.749	108 Lap	37.960.409.310	90,98%	2,849	BAPENDASU	
		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	20 laporan	2.320.229.166	16 laporan	2.204.601.598	4 laporan	788.675.000				2 Lap	90.563.000	1 Lap	173.683.650	1 Lap	315.889.650	4 laporan	580.136.300	18 Lap	2.784.737.898	73,56%	1,200	BAPENDASU	
		Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	20 laporan	1.326.269.380	16 laporan	2.560.948.119	4 laporan	2.507.801.900				2 Lap	14.658.000	1 Lap	360.749.129	1 Lap	1.682.011.299	4 laporan	2.057.418.428	18 Lap	4.618.366.547	82,04%	3,482	BAPENDASU	
		Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 laporan	2.604.628.400	16 laporan	3.289.132.378	4 laporan	7.437.054.180				2 Lap	208.876.890	1 Lap	423.004.000	1 Lap	7.058.668.960	4 laporan	7.690.549.850	18 Lap	10.979.682.228	103,41%	4,215	BAPENDASU	
		Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Pelaporan Basis Data Pajak	20 laporan	1.958.450.600	16 laporan	3.189.287.379	4 laporan	1.270.426.000				1 Lap	31.345.000	1 Lap	140.850.500	2 Lap	714.318.400	4 laporan	886.513.900	19 Lap	4.075.801.279	69,78%	2,081	BAPENDASU	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemmasalahan yang telah Ditindaklanjuti dari Belum Ditindaklanjuti	20 dokumen	429.950.940	16 dokumen	416.026.056	4 dokumen	816.170.000				2 dok	-	1 dok	-	1Dok	655.571.100	4 dokumen	655.571.100	16 Dok	1.071.597.156	80,32%	2,492	BAPENDASU	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	20 laporan	4.682.682.190	16 laporan	11.971.696.031	4 laporan	2.929.290.250				1 Lap	106.617.500	1 Lap	265.243.500	2 Lap	2.086.667.171	4 laporan	2.458.528.171	19 Lap	14.430.224.202	83,93%	3,082	BAPENDASU	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																		100%		82,17%						
Predikat Kinerja																		Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					428.759.887.178,00	100%	759.453.794.394,00		528.350.896.118	1.082	70.723.958.242	7%	452.060.390	1.280	290.470.883.282	1.280	141.918.972.678	100%	509.870.884.517		1.269.324.678.911	96,50%	22			
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM IV)																				96,50%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM IV)																										

Berdasarkan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 maka dapat diarahkan langkah korektif yang menjadi kebijakan dalam perencanaan tahun berikutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Perhitungan dan perumusan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2023 yang disesuaikan dengan prediksi pertumbuhan potensi objek pajak daerah dan asumsi lainnya yang relevan;
2. Pemetaan kebutuhan belanja langsung dihitung lebih cermat dengan prioritas belanja diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan pelayanan, revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan;
3. Menyesuaikan kebutuhan belanja kegiatan terhadap kondisi pandemi covid-19 yang diperkirakan masih terjadi ditahun mendatang dengan tetap melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atas dasar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana table berikut :, sebagaimana Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPENDA
Provinsi Sumatera Utara**

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG/JURUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018 BASELINE	KONDISI AWAL		TARGET SETELAH PERUBAHAN RPJMD & REALISASI						PERSENTASE CAPAIAN KINERJA					PERANGKAT AT DAERAH PENANGG		
				2019		2020		2021		2022		2023							
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2019	2020	2021		2022	2023
A. BADAN PENDAPATAN DAERAH																			
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen		48,25%	49,00%	50,38%	51,00%	53,00%	-	55,00%	-	57,00%	56,82%	101,55%	-	-	-	99,68%	Bapenda Provsu dan PD
2	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama Kendaraan	Persen		10,01%	10,23%	8,19%	8,39%	8,89%	9,15%	9,75%	9,65%	11,66%	-1,47%	102,20%	102,44%	102,92%	98,97%	-12,61%	Bapenda Provsu
3	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan	Persen		1,20%	0,01%	1,20%	1,10%	1,20%	1,24%	1,20%	1,29%	1,20%	12,64%	0,83%	91,67%	103,33%	107,50%	1053,33%	Bapenda Provsu
4	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari Tahun Sebelumnya	Persen		-92,58%	-134,89%	2,00%	2,19%	2,00%	1,23%	2,00%	2,26%	2,00%	-27,80%	145,70%	109,50%	61,50%	113,00%	-1390,00%	Bapenda Provsu
5	Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari Tahun Sebelumnya	Persen		10,80%	8,45%	10,80%	12,22%	10,80%	10,30%	10,80%	10,80%	10,80%	-2,14%	78,24%	113,15%	95,37%	100,00%	-19,81%	Bapenda Provsu

Pada Tahun 2023, kinerja pelayanan BAPENDA Provinsi Sumatera Utara masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada indikator Proporsi Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik belum memenuhi target yang mana realisasinya -12,61% dari target tahun 2023 $\geq 10\%$. Selanjutnya pada indikator Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari Tahun Sebelumnya jug belum memenuhi target yang mana realisasinya sebesar -19,81%.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja BAPENDA Provinsi Sumatera Utara, BAPENDA Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan, konsentrasi tugas pada pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BAPENDA Sumatera Utara sebagai instansi pemungut PAD, berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan provinsi Sumatera Utara.

Dalam perkembangannya, kebutuhan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pembangunan selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut mengharuskan BAPENDA Provinsi Sumatera Utara untuk selalu melakukan pengembangan terhadap Kebijakan Keuangan Daerah, yang diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. Sektor Pajak Daerah tetap menjadi kunci penting dalam penerimaan Pendapatan Daerah sehingga Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didalamnya terdapat intensifikasi pemungutan 5 (lima) sektor Pajak Daerah yang merupakan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara.

Potensi yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan penerimaan Pajak daerah adalah dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), akan tetapi masih perlu klarifikasi perhitungannya dengan *vendor*, selain itu pendapatan dari Pajak Rokok Daerah perlu untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan serta Peningkatan Retribusi daerah yang dilaksanakan melalui forum Retribusi Daerah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), serta kemungkinan keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan (*shareholders*) beberapa BUMN yang beroperasi di Sumatera Utara.

4.3.1. FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan PAD, terdapat permasalahan yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari hasil catatan dan evaluasi pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat disampaikan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas SDM pengelola pemungutan pajak daerah;
2. Kurang optimalnya pelayanan jasa pembayaran pajak daerah hal ini terutama penyediaan sarana dan prasarana di tempat pembayaran pajak;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan aset sebagai sumber retribusi daerah;
5. Belum optimalnya penegakan hukum;
6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemungut pajak dan retribusi daerah;
7. Kebutuhan pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dituntut semakin cepat untuk memenuhi permintaan masyarakat.
8. Belum adanya langkah konkrit yang bersifat inovatif dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023 menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan daerah yang optimal.

Adapun faktor pendorong adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi, sinergitas dan kerjasama Pemprovsu dengan APH serta stakeholder terkait dalam optimalisasi pendapatan daerah sudah terbangun dengan baik.
2. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam rangka akselerasi optimalisasi pendapatan daerah.
3. Kerja keras seluruh jajaran ASN Bapenda Provsu dandalam rangka memberhasilkan program intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah.
4. Adanya sistem aplikasi berbasis IT dalam rangka memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

4.3.2. Formulasi Isu – isu Penting

Beberapa isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2021 yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung pada UPT Samsat Badan Pendapatan Daerah Provsu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan masyarakat / wajib pajak.
2. Rehab berat beberapa UPT Samsat yang memiliki potensi pajak yang besar dalam rangka optimalisasi pelayanan pendapatan dan retribusi;
3. Optimalisasi Pendapatan Daerah dan pembangunan sistem layanan yang memudahkan pembayaran pajak berbasis teknologi dan mengoptimalkan peran e-samsat yang merupakan amanat koordinasi, supervise dan pencegahan KPK;
4. Penyelesaian sengketa dan penagihan tunggakan pajak air permukaan dan pajak lainnya;
5. Pengadaan bus samsat keliling dan kendaraan samsat masuk kampung untuk menggantikan kendaraan yang sudah tidak laik pakai;
6. Pembuatan gerai samsat di lokasi – lokasi strategis;
7. Pengembangan/penyempurnaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM (e-samsat dan go samsat sumut);

8. Sosialisasi pembayaran/pendataan pajak kendaraan bermotor/surat peringatan pajak kendaraan bermotor kerjasama dengan Pemko/Pemkab setempat;
9. Kajian Potensi PKB/BBNKB Provinsi Sumatera Utara untuk pemutakhiran data pajak;
10. Sinkronisasi Database Kendaraan Bermotor;
11. Update data potensi wajib pajak air permukaan;
12. Rekonsiliasi data potensi PBBKB dan BBNKB;

Untuk dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah, maka berikut adalah arah Kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli daerah oleh BAPENDA Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang pemungutan pajak daerah;
2. Menerapkan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya personil untuk melakukan penagihan pajak secara door to door dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan/retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
5. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan Undang-Undang;
6. Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Daerah, berbagai upaya yang akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang taat membayar pajak.
2. Memenuhi kebutuhan pengadaan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Bersama Samsat di Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka menjaga kenyamanan wajib pajak;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan untuk pengembangan moda pembayaran PKB secara elektronik melalui transaksi mesin *Electronic Data Capture* (EDC), maupun kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh mitra Payment Point Online Bank (PPOB);
4. Mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pembayaran PKB melalui media marketplace/eMoney seperti: Shopee, Ovo, Linkaja, Dana dsb.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rumusan target kinerja beserta rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada BAPENDA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis dalam dokumen Rencana Strategis BAPENDA Tahun 2024 – 2026. Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, data yang digunakan adalah data perencanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026. Ekstraksi data rencana kegiatan, pagu indikatif maupun target kinerja tahun 2025 pada dokumen tersebut merupakan asumsi awal perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah.

Review terhadap RKPD dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, proses perbandingan antara dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai /tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				512.492.980.788	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				515.725.325.661	Anggaran disesuaikan
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provsu	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %	3.166.515.000	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provsu	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100%	1.783.510.000	Terdapat penyesuaian anggaran
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Provsu	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Tahun	1.096.016.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Provsu	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Tahun	1.531.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SIPD	Provsu	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	4 Kali	160.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SIPD	Provsu	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	4 Kali	252.110.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provsu	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	2 Kali	1.909.599.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provsu	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	0	0	Sub Kegiatan dihapus

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provsu		100%	247.998.882.696	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provsu		100%	283.927.907.696	Terdapat penyesuaian anggaran
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provsu	Tersedianya Gaji PNS	1 Tahun	243.731.420.696	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provsu	Tersedianya Gaji PNS	1 Tahun	278.731.420.696	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provsu	Tertibnya Administrasi Tugas PNS	1 Kali	1.624.217.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provsu	Tertibnya Administrasi Tugas PNS	1 Kali	1.624.217.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provsu	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Kali	389.875.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provsu	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Kali	588.505.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provsu	Tersedianya Honor Penatausahaan	12 bulan	2.253.370.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provsu	Tersedianya Honor Penatausahaan Keuangan	12 bulan	2.983.765.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provsu		100%	1.801.283.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provsu		100%	2.951.283.100	Terdapat penyesuaian anggaran
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provsu	Tersedianya Pakaian Dinas	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Provsu	Tersedianya Pakaian Dinas	-	-	-
	Pemindahan Tugas ASN	Provsu	Tersusunnya Data Pegawai	1 Kali	179.300.000	Pemindahan Tugas ASN	Provsu	Tersusunnya Data Pegawai	1 Kali	329.300.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provsu	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Kali	1.621.983.100	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provsu	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Kali	2.621.983.100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provsu		100%	41.437.868.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provsu		100%	85.546.804.284	Terdapat penyesuaian anggaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Provsu	Tersedianya Alat Listrik Kantor	1 Tahun	406.848.874	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Provsu	Tersedianya Alat Listrik Kantor	1 Tahun	1.251.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provsu	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	23.139.708.326	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provsu	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	42.105.554.284	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provsu	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	1 Tahun	8.166.561.750	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provsu	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	1 Tahun	12.100.460.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provsu	Tersedianya Barang Cetakan	1 Tahun	4.382.600.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provsu	Tersedianya Barang Cetakan	1 Tahun	12.587.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Provsu	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	1 Tahun	757.230.000	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Provsu	Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	1 Tahun	421.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provsu	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	12 Kali	4.584.920.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provsu	Terselenggaraan ya Rapat Koordinasi	12 Kali	7.082.250.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provsu		100%	178.746.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provsu		100%	31.000.000.000	Terdapat Penyesuaian Anggaran

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Tersedianya Kendaraan Dinas Khusus/Mobil Samsat keliling	10 Unit	7.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Tersedianya Kendaraan Dinas Khusus/Mobil Samsat keliling	10 Unit	9.000.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Tersedianya Gedung Kantor Baru	5 Unit	171.746.800.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Tersedianya Gedung Kantor Baru	5 Unit	22.000.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu		100%	21.278.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu		100%	77.524.000.000	Terdapat Penyesuaian Anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan UPT	1 Tahun	7.667.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	Terbayarnya Rekening Listrik, Air dan UPT	1 Tahun	10.566.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Provsu	Pelayanan Kantor Menjadi Lebih Baik	1 Tahun	13.610.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Provsu	Pelayanan Kantor Menjadi Lebih Baik	1 Tahun	66.958.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100%	13.767.132.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provsu		100%	32.991.820.581	Terdapat Penyesuaian Anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	2 Kali	4.907.847.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provsu	Terpeliharany a Kendaraan Dinas Operasional	2 Kali	9.271.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provsu	Terpeliharanya Gedung Kantor	20 UPT	307.797.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provsu	Terpeliharany a Gedung Kantor	20 UPT	12.721.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	4 Kali	8.551.487.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	4 Kali	10.999.820.581	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				252.478.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				0	
8	Pembinaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Provsu		100%	252.478.000	Pembinaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Provsu		100%	0	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Provsu	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan	1 Tahun	252.478.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Provsu	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Perundang - Undangan	0	0	Sub kegiatan sudah dihapus
III	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provsu		100%	5.296.493.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Provsu		100%	19.120.700.000	Terdapat Penyesuaian Anggaran

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Provsu	Dokumen Perencanaan Menjadi Lebih Teratur	1 Tahun	552.100.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Provsu	Dokumen Perencanaan Menjadi Lebih Teratur	1 Tahun	1.000.000.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	1 Tahun	587.037.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	1 Tahun	1.600.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	1 Tahun	502.348.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	1 Tahun	4.374.100.000	
	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provsu	Pengelolaan Data Pajak Daerah	1 Tahun	1.527.231.000	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Provsu	Pengelolaan Data Pajak Daerah	0	0	Sub kegiatan sudah dihapus
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Pajak	1 Tahun	249.568.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Pajak	1 Tahun	4.500.000.000	
	Pengendalian. Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	1 Tahun	1.878.209.000		Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan	1 Tahun	7.646.600.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Pengawasan Pajak			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah yang memiliki urusan penunjang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik usulan masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**

Gambar 3.1

Tema Pembangunan RKP Tahun 2025



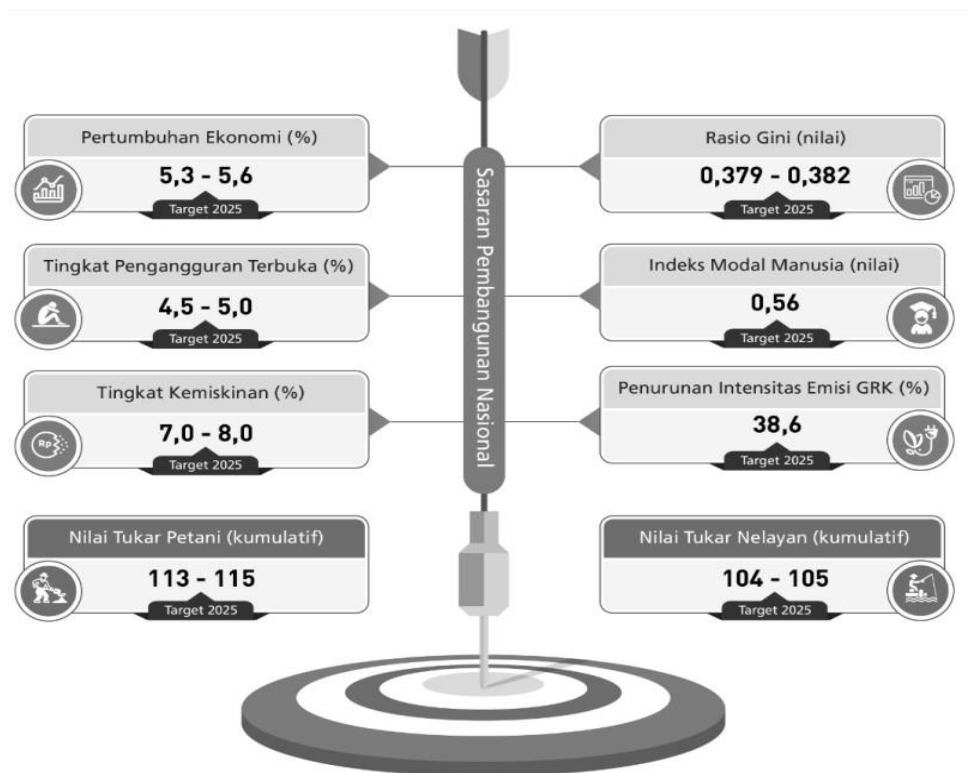
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai

Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Target indikator sasaran pembangunan Tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut :

Gambar 4 :
Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

- 1. PRIORITAS I :** Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2. PRIORITAS II:** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syari'ah Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

- 3. PRIORITAS III** : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
- 4. PRIORITAS IV** : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
- 5. PRIORITAS V** : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- 6. PRIORITAS VI** : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
- 7. PRIORITAS VII** : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, narkoba, Judi dan Penyeludupan.
- 8. PRIORITAS VIII** : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Bentuk tindak lanjut yang dilaksanakan Bapenda Provinsi Sumatera Utara dalam menindaklanjuti arah kebijakan tersebut adalah dengan upaya-upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah diantaranya :

1. Menyesuaikan besaran dan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
3. Meningkatkan sarana, prasarana, serta memperluas dan mengembangkan kerjasama dengan mitra dalam rangka penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah bagi Masyarakat.

1.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang telah ditetapkan khususnya Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kewenangan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan upaya - upaya sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi UPT-UPT yang tersebar di beberapa kabupaten/kota;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan;
3. Menyusun regulasi terkait penataan aset daerah yang mengatur pemanfaatan aset-aset milik Provinsi Sumatera Utara baik untuk kepentingan publik maupun untuk pemanfaatan yang berorientasi profit;
4. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
5. Mendorong peningkatan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dalam dana perimbangan pada alokasi Pendapatan Transfer Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah di atas, untuk merealisasikan target perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain sebaga berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - a. Koordinasi intensif ke kementerian, instansi dan lembaga terkait untuk kepastian pengelolaan pajak yang masih bermasalah, seperti sengketa pajak air permukaan;
 - b. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - c. Meningkatkan koordinasi untuk penerimaan dana bagi hasil pajak perkebunan sebagai sumber pendapatan daerah yang baru;
 - d. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - e. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

- f. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui Samsat Drive Thru, Gerai Samsat (samsat corner) dan samsat Gendong;
 - g. Melakukan inovasi dalam rangka intensifikasi pajak daerah;
 - h. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
 - i. Penyebarluasan informasi di bidang pajak daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat, contoh: mengirimkan pesan melalui media komunikasi WhatsApp (WhatsApp blast);
 - j. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta penguatan peran Badan Pengawas dalam pengendalian dan evaluasi kinerja BUMD agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mampu meningkatkan profit;
 - k. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; dan
 - l. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer yang mencakup Dana Perimbangan, dilakukan melalui :
- a. Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

- b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, strategi yang ditempuh melalui :
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;
 - c. Pembentukan lembaga pengelola dana masyarakat.

1.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

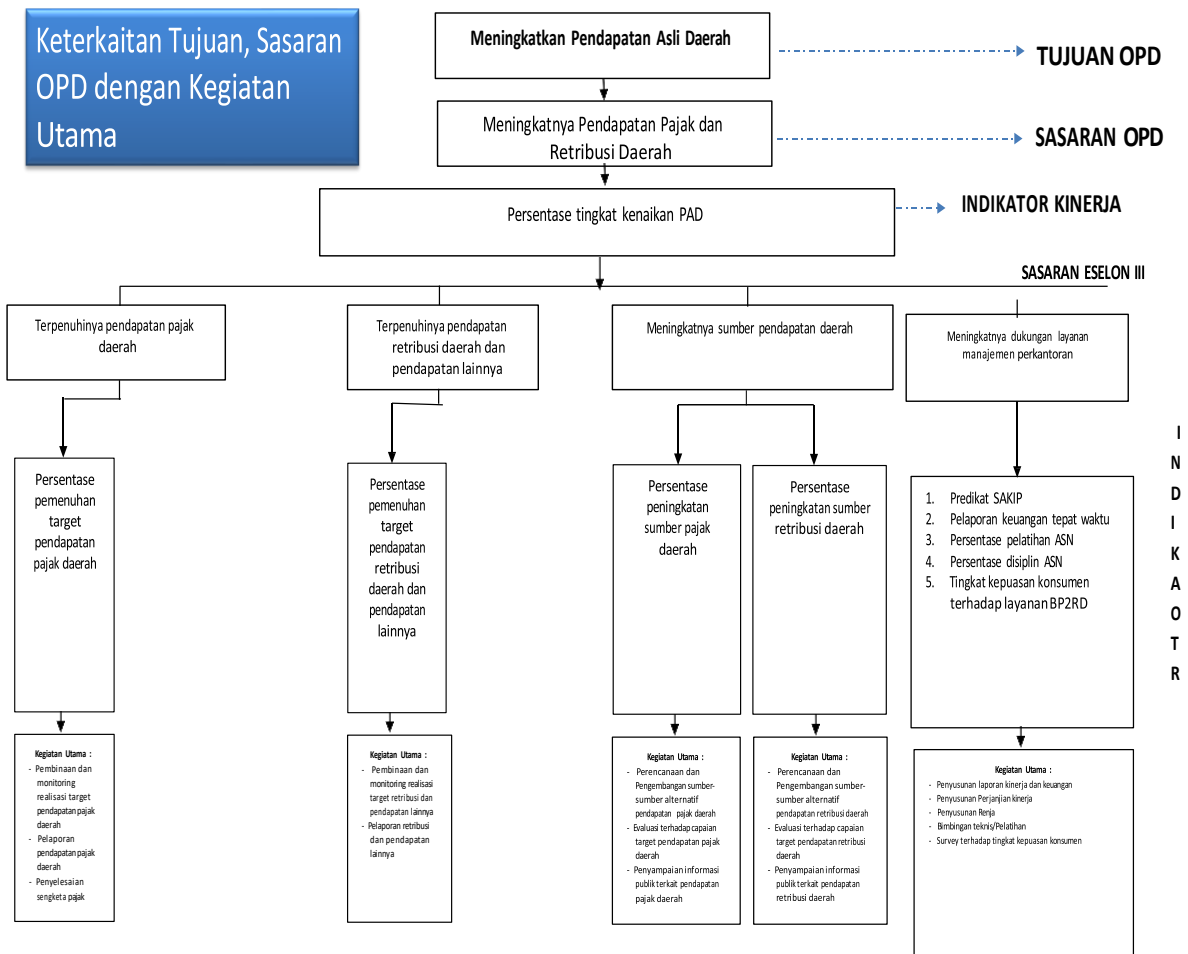
Perumusan tujuan dan sasaran BAPENDA Provinsi Sumatera Utara didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan sasaran target kinerja Renstra BAPENDA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2025 yaitu **“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional, Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berdaya Saing”** yang memiliki sasaran dalam meningkatkan pendapatan daerah yakni sebagai berikut :

1. Proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran;
2. Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah;

3. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya;
4. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Bakar Kendaraan Bermotor dan dari tahun sebelumnya;
5. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya;
6. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Rokok dari tahun sebelumnya.
7. Persentase Kenaikan Pemungutan Retribusi Daerah dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Realisasi			Target	
		2021	2022	2023	2025	2025
Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Profesional, Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berdaya Saing” yang memiliki sasaran Meningkatkan Pendapatan daerah	1 Proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran	2,96%	-1,25%	≥10%	≥10%	≥10%
	2 Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	44,05%	44,85%	53%	55%	55%
	3 Persentase Kenaikan Penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun sebelumnya	-26,36%	-26,69%	8,89%	9,75%	9,75%
	4 Persentase Kenaikan Penerimaan PBBKB dari Tahun Sebelumnya	1,15%	-8,67%	1,20%	1,20%	1,20%
	5 Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun sebelumnya	42,34%	9,89%	2%	2%	2%
	6 Persentase Penerimaan Pajak Rokok dari Tahun Sebelumnya	-3,13%	33,40%	10,80%	10,80%	10,80%



Gambar 3.1.

Cascading Keterkaitan Dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Table 3.2. Rencana Target Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

NO	URAIAN	REALISASI TA. 2021 AUDITED	REALISASI TA. 2022 AUDITED	REALISASI TA. 2023 UNAUDITED	APBD TA. 2024 PERGUB No.51 2023	PROYEKSI TARGET TA 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	14.034.036.626.479	12.594.412.688.862	12.758.254.697.291	14.634.905.519.358	15.285.432.726.570
1.1	Pendapatan Asli Daerah	6.402.714.086.507	7.258.018.251.933	7.226.109.603.501	8.972.327.385.958	9.507.662.949.275
1.1.1	Pajak Daerah	5.730.574.818.536	6.646.504.121.057	6.667.891.089.708	8.057.906.541.491	8.654.662.949.275
1.1.2	Retribusi Daerah	27.129.155.454	28.954.300.036	33.234.330.583	36.959.862.067	43.000.000.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	384.479.882.887	302.399.281.274	299.801.727.761	331.891.359.887	450.000.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	260.530.229.630	280.160.549.565	225.182.455.449	545.569.622.513	360.000.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	7.518.180.471.987	5.250.014.270.033	5.443.196.241.831	5.637.010.133.400	5.754.201.777.295
1.2.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	797.628.780.665	739.563.418.216	581.910.953.859	489.469.391.400	547.825.912.520
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.463.686.589.000	2.432.954.103.819	2.682.814.024.612	2.904.966.554.000	2.963.801.676.775
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik	4.256.865.102.322	2.041.308.500.998	2.148.915.361.360	2.242.574.188.000	2.242.574.188.000
1.2.4	Dana Insentif Daerah (DID)	-	36.188.247.000	29.555.902.000	-	-
1.3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	113.142.067.985	86.380.166.896	88.948.851.959	25.568.000.000	23.568.000.000
1.3.1	Hibah	70.624.665.645	73.032.471.483	80.249.646.343	7.568.000.000	20.000.000.000
1.3.2	Lainnya	42.517.402.340	13.347.695.413	8.699.205.616	18.000.000.000	3.568.000.000

1.4. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 guna mencapai Tujuan dan Sasaran BAPENDA Provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Provinsi

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang milik daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan pokok dari program ini terdiri dari :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun kegiatan pokok dalam program ini adalah :

- 1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, yang difokuskan pada upaya penyebaran informasi tentang pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan pendapatan daerah, dengan kegiatan utamanya adalah:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ini direncanakan untuk pencapaian visi misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2025 dalam urusan pendapatan daerah sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja BAPENDA Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ini diusulkan 3 (tiga) program. Pemilihan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang mana BAPENDA Provinsi Sumatera Utara mendukung pencapaian prioritas kedelapan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik. Program dan kegiatan BAPENDA Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Rencana Kerja BAPENDA Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dengan pagu indikatif Rp.450.0000.0000 dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta isu-isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Renja tahun 2025. Adapun sasaran prioritas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Intensifikasi melalui pendataan ulang dan razia terhadap potensi pajak daerah (kendaraan bermotor–termasuk alat-alat berat/besar dan pajak APU);
2. Pengoperasian Layanan Pembayaran PKB dengan e-SAMSAT SUMUT;

3. Pendekatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui pendefenitifan UPT/Samsat pada setiap kabupaten/kota dan pengoperasian gerai samsat, samsat keliling serta perbaikan sarana dan prasarana;
4. Peningkatan Kualitas SDM (*In-house Training* dan Juru Sita Pajak);
5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
6. Integrasi dan Sentralisasi Database Kendaraan Bermotor antara Polri-Badan Pendapatan Daerah dan Jasa Raharja;
7. Penyempurnaan Struktur Organisasi UPT BAPENDASU;
8. Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Kesamsatan dan Pendapatan Daerah;
9. Sensus / Penelusuran Kendaraan Bermotor Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KB-TMDU);
10. Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP);
11. Penyempurnaan/Revisi Regulasi tentang Pemungutan Pendapatan Daerah;

Dalam Rencana Kerja BAPENDA Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ini jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD baik nomenklatur kegiatan maupun pagu indikatif kegiatan yang semata-mata dikarenakan perubahan prioritas dan menyesuaikan isu yang berkembang pada Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di bidang pendapatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
BAPENDA Provinsi Sumatera Utara**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah				334.787.498.701	
5	02	01	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.117.000.000	
5	02	01	1.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Daerah	Provsu	4 Dokumen	797.914.000	PAD
5	02	01	1.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SIPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	Provsu	2 Kali	352.110.000	PAD
5	02	01	1.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja	Provsu	4 Kali	1.966.976.000	PAD
5	02	01	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				241.486.833.161	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	01	1.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji PNS	Provsu	1 Tahun	239.796.924.161	PAD
5	02	01	1.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertibnya Administrasi Tugas PNS	Provsu	12 Bulan	520.725.000	PAD
5	02	01	1.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provsu	12 Bulan	2.016.817.000	
5	02	01	1.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Provsu	2 Kali	502.220.000	PAD
5	02	01	1.0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Data/Bahan Pemeriksaan	Provsu	2 Kali	666.964.000	PAD
5	02	01	1.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.381.390.000	
5	02	01	1.0 5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	Provsu	1 Kali	637.500.000	PAD
5	02	01	1.0 5	08	Pemindahan Tugas ASN	Tersusunnya Data Pegawai	Provsu	2 Kali	206.720.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	01	1.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Provsu	4 Kali	537.170.000	PAD
5	02	01	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				31.283.595.540	PAD
5	02	01	1.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik Kantor	Provsu	12 Bulan	100.000.000	PAD
5	02	01	1.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Provsu	4 Kali	25.547.749.840	PAD
5	02	01	1.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	Provsu	12 Bulan	1.193.403.500	PAD
5	02	01	1.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak	Provsu	12 Bulan	3.232.953.200	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan kantor	Provsu	12 Bulan	150.000.000	PAD
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi	Provsu	12 Kali	1.059.489.000	PAD
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.600.000.000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Khusus/Mobil Samsat keliling	Provsu	5 Unit	1.600.000.000	PAD
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor Baru	Provsu	1 Unit	5.000.000.000	PAD
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.629.637.500	PAD
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	12 Bulan	1.792.000.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provsu	12 Bulan	42.837.637.500	PAD
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.605.038.500	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Provsu	4 Kali	2.045.025.000	PAD
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor dan bangunan lain	Provsu	25 UPT	4.244.017.500	PAD
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terawatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provsu	33 UPT	3.315.996.000	
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah				206.769.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	02	1.0 2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota				206.769.000	
5	02	02	1.0 2	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Peraturan Perundang Undangan	Provsu	1 Tahun	206.769.000	PAD
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				11.933.193.000	
5	02	04	1.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				11.933.193.000	
5	02	04	1.0 1	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen Perencanaan Menjadi Lebih Teratur	Provsu	1 Tahun	290.000.000	PAD
5	02	04	1.0 1	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pajak Daerah	Provsu	1 Tahun	2.201.120.000	PAD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	02	04	1.0 1	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	Provsu	1 Tahun		PAD
5	02	04	1.0 1	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengelolaan Data Pajak Daerah	Provsu	2 Kali	3.939.060.000	PAD
5	02	04	1.0 1	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Pajak	Provsu	4 Kali	825.694.000	PAD
5	02	04	1.0 1	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Provsu	4 Kali	4.677.319.000	PAD

4.2 Inovasi Perangkat Daerah

BAPENDA Provinsi Sumatera Utara inovasi dalam pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan cara Melakukan Pelayanan **Pembayaran E-Commerce**. Pelayanan pembayaran *E-Commerce* ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga dengan adanya layanan ini maka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan melalui seluruh bank nasional dan juga *E-commerce* dimana dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan melalui Financial Technology (Fintech) Industri Startup seperti Tokopedia, Bukalapak dan juga melalui Alfamart, Indomaret dan Alfamidi.

Melalui inovasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Masyarakat tidak perlu mendatangi gerai samsat untuk melakukan pembayaran pajak sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB V

P E N U T U P

Demikian Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan penyusunan rancangan final RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, bahan diskusi forum Perangkat Daerah maupun forum internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Dokumen ini merupakan pedoman bagi segenap aparatur untuk melaksanakan program dan kegiatan serta memudahkan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara, terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah direncanakan dan dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan BAPENDA Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.

Atas peran aktif, sumbang saran dan pemikiran dari semua pihak diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga upaya kita bersama ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dan Masyarakat Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat dapat diwujudkan.

Medan,

2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**ACHMAD FADLY, S.SOS, M.SP
PEMBINA TK. I
NIP. 19740319 199402 1 003**